



Media Title	Kompas		
Head Line	Buruh Kembali Tutup Tol		
Date	4 Des 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	1-15	Article Size	
Journalist	Pin/Ray	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

# Buruh Kembali Tutup

Pemerintah Diminta Bertindak Tegás

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta tegas menangani unjuk rasa buruh. Buruh memiliki hak menyalurkan aspirasi. Namun, jika dalam melakukan haknya itu mereka mengganggu hak orang lain, itu berarti telah terjadi pelanggaran aturan sehingga mereka wajib ditertibkan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Suahasil Nazara, Selasa (3/12), meminta aparat penegak hukum menerbitkan unjuk rasa buruh yang mengganggu aktivitas masyarakat umum sesuai aturan.

Unjuk rasa buruh memperjuangkan kenaikan upah minimum terus dilakukan di wilayah Jabodetabek dalam satu bulan terakhir. Aksi mereka pun mulai mengarah ke tindakan anarkistis. Saat berunjuk rasa di Balaikota, Kamis (28/11) lalu, buruh DKI Jakarta merobohkan sebagian pagar gedung tempat Gubernur DKI berkantor itu.

Penyampaian aspirasi diiringi perusakan fasilitas umum, berulang kembali saat unjuk rasa buruh di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Selasa kemarin Pembatas besi antara jalur tol dan jalan reguler di ruas Tol Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten, sengaja dirusak agar mereka bisa memasuki jalan tol menggunakan sepeda motor.

Sebelum menduduki Jalan Tol Bitung, massa bentrok dengan polisi. Bentrokan terjadi karena sejumlah buruh melempari polisi dengan batu dan botol minuman kemasan. Selanjutnya, buruh terus memaksa menembus blokade polisi.

Massa buruh yang awalnya berkerum di pintu masuk Tol Bitung membubarkan diri setelah beberapa polisi menembakkan gas air mata. "Petugas menembakkan gas air mata untuk menghalau buruh yang akan menutup pintu masuk tol," kata Kepala Kepolisian Resor Tangerang Kabupaten Komisaris Besar Irfing Jaya.

## Macet parah

Akibat unjuk rasa buruh yang memblokir akses utama Jakarta-Tangerang, semua jaringan jalan di Jakarta dan sekitarnya nyaris terkunci sejak siang hingga malam hari. Kemacetan paling parah terjadi menjelang pintu keluar Tol

Kebon Nanas, Kota Tangerang. Hingga pukul 19.30 sekitar 1.000 buruh Kota Tangerang menduduki Jalan Raya Serpong, Kebon Nanas-Bumi Serpong Damai dan sebaliknya, poros utama Kota Tangerang-Tangerang Selatan.

Sejak siang hingga pukul 18.00, kendaraan dari arah Balaraja menuju Cikupa dan Kota Tangerang melalui pintu Tol Bitung tidak bisa bergerak. "Ya mau bagaimana lagi. Padahal, saya sudah mau keluar tol, tetapi tidak diizinkan sebab sudah diblokade," ujar Muhlis (49), sopir pabrik gamten di Cikupa.

Dampak kemacetan juga dialami Widi (34), karyawan pabrik di kawasan Cikupa. "Hanya satu dari enam bus karyawan yang bisa masuk dan mengangkat karyawan pulang. Bus lainnya terjebak macet," kata Widi, warga Ciledug, Kota Tangerang.

Dalam kondisi normal, karyawan pulang pukul 17.00 dan tiba di Kebon Nanas, Kota Tangerang, pukul 17.30. "Sudah pukul 18.00 bus baru berhasil keluar dari kawasan pabrik dan masuk Tol Cikupa," kata Widi.

Setelah satu jam melintasi tol menuju Kota Tangerang yang masih padat, bus karyawan yang ditumpangi Widi akhirnya berhasil keluar Tol Kebon Nanas. Namun, penumpang terpaksa turun dan berjalan kaki hingga sejauh 1 kilometer menuju tempat parkir kendaraan mereka karena Jalan Raya Serpong diduduki buruh dari Kota Tangerang.

Pemblokadean jalan oleh buruh di Jalan Surya Dharma, Kota Tangerang, yang merupakan akses masuk Bandara Internasional

Soekarno-Hatta lewat pintu M1 (melalui Kota Tangerang) dikeluarkan Gustiana Dewi (46), ibu rumah tangga, warga Legok, Ka-

bupaten Tangerang. Ia kesal harus riuenggu lama karena terjebak macet saat akan pulang menjemput keluarga di bandara.

Di media sosial, keluhan kemacetan ini membahana. Akun @TMC Polda Metro milik Traffic Management Center Polda Metro Jaya hingga Selasa pukul 21.00 melaporkan arus lalu lintas padat di ruas Sudirman-Semanggi.

Sepanjang ruas Tol Dalam Kota pun tak berkurang kepadatannya sejak sore hingga malam hari. Arus kendaraan bermotor tersendat di kawasan Mampang Prapatan hingga Cawang, yang merupakan akses langsung ke arah Bogor.

## Tegas soal UMP

Terlepas dari unjuk rasa buruh yang mengganggu masyarakat, Nazara meminta pemerintah bersikap tepat dalam menghadapi tuntutan buruh agar nasib mereka tak terus mengantung. Nazara mendesak pemerintah mempertimbangkan beberapa dimensi yang melingkupi persoalan tuntutan kenaikan upah minimum.

"Pemerintah pusat sudah menetapkan aturan agar kesejahteraan pekerja dijamin dengan penetapan upah minimum yang angkanya didekatkan semaksimal mungkin dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Pemerintah daerah yang belum memenuhinya diharapkan segera menyelesaikan. Ini yang sampai sekarang belum tuntas," katanya.

Penetapan upah minimum tidak sekadar menaikkan gaji pekerja, melainkan diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Buruh wajib memenuhi tuntutan target peningkatan produktivitas perusahaan itu.

Yang menjadi masalah, lanjut Nazara, adalah perhitungan KHL justru agak terlepas dari bebe-

rapa parameter yang seharusnya ada dalam komponen penetapan KHL. Soal inflasi dan kemiskinan, misalnya, justru bukan menjadi faktor penentu KHL.

## Tarik perhatian

Koordinator aksi buruh di Kabupaten Tangerang, Koswara, mengatakan, unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes atas penetapan UMK 2014 yang dinilai tidak berpihak kepada buruh. Mereka mendesak pemerintah kota/kabupaten dan provinsi merevisi besaran nilai UMK dari Rp 2.442 juta dan Rp 2.444 juta per bulan.

Koordinator Kabut Bergerak Sunarno mengatakan, para buruh menginginkan UMK di Kota Tangerang Rp 2.605 juta dan Rp 2.602 juta per bulan untuk Kabupaten Tangerang. Sunarno mengatakan, buruh menilai penetapan UMK belum sesuai dengan aspirasi buruh, melainkan salah satu pihak saja. "Mulai dari nilai UMK yang ditetapkan hingga penetapan UMK itu tidak sesuai dengan keinginan buruh saat ini," katanya.

Koswara berdalih, aksi dilakukan agar pemerintah mendengar jeritan buruh.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah menetapkan UMK 2014 seperti tertuang dalam SK Gubernur Banten No 151/Kep.582-Huk/2013 tanggal 22 November. Dalam SK itu ditetapkan besaran UMK 2014 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Lebak Rp1,49 juta per bulan, Kota Serang (Rp 2,166 juta per bulan), Kabupaten Pandeglang (Rp 1,418 juta per bulan), Kota Tangerang Selatan (Rp 2,442 juta per bulan), Kabupaten Tangerang (Rp 2,442 juta per bulan), Kota Cilegon (Rp 2,443 juta per bulan), dan Kota Tangerang (Rp 2,444 juta per bulan). (RIN/RAY/RIS/JOS/NEL)